

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2017



# KATA PENGANTAR



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2017 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP ini menyajikan capaian kinerja (*performance results*) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selama tahun 2017, yang diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai tolok ukur keberhasilan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2017 selain memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dan juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam kerangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.



Adapun secara umum hasil capaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2016 dapat memenuhi target, namun tidak dapat pula kami pungkiri masih ada beberapa indikator kinerja yang masih berproses.

Kami berharap analisis dan evaluasi Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2017 dapat memberikan dorongan dan semangat dari seluruh komponen khususnya di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sehingga penyelenggaraan kearsipan secara nasional dapat berjalan dengan baik dan benar yang pada akhirnya mempercepat perwujudan *Good Governance* dan *Clean Government* serta menjadikan arsip sebagai sumber informasi dan edukasi.

Kepala



Dr. Mustari Irawan, MPA.



# KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### IKHTISAR EKSEKUTIF

### PERNYATAAN TELAH DI REVIEW



---

## BAB I

### PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
  - B. STRUKTUR ORGANISASI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI)
  - C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS
  - D. SISTEMATIKA PENYAJIAN
- 

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
  - B. TUJUAN ANRI
  - C. SASARAN STRATEGIS
  - D. PERJANJIAN KINERJA
- 



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
  - B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
- 

## BAB IV

### PENUTUP



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Pencapaian cita-cita nasional dan memperkokoh serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, ANRI mempunyai peran strategis dalam mewujudkan identitas dan jati diri bangsa serta mengejawantahkan arti penting arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arti penting arsip ini harus dapat diwujudkan dalam bentuk kontribusi yang konkret dan menyentuh kepentingan seluruh *stakeholder*, tak terkecuali kepentingan dan peran negara dalam pergaulan dan hubungan internasional. Untuk dapat mewujudkan peran dan kontribusi nyata tersebut maka penyelenggaraan kearsipan yang andal merupakan suatu keniscayaan yang harus dibangun dan didorong oleh seluruh elemen bangsa.

Oleh karena itu penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan secara masif dan menyeluruh yang meliputi:

- 1) Penetapan kebijakan,
- 2) Pembinaan kearsipan,
- 3) Pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional (SKN),
- 4) Pembangunan SKN, SIKN dan pembentukan JIKN,
- 5) Organisasi Kearsipan,
- 6) Pengembangan SDM,
- 7) Prasarana dan Sarana,
- 8) Perlindungan dan penyelamatan arsip,



- 9) Sosialisasi kearsipan,
- 10) Kerjasama, dan
- 11) Pendanaan.



## Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Tahun 2017 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Analisis Kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

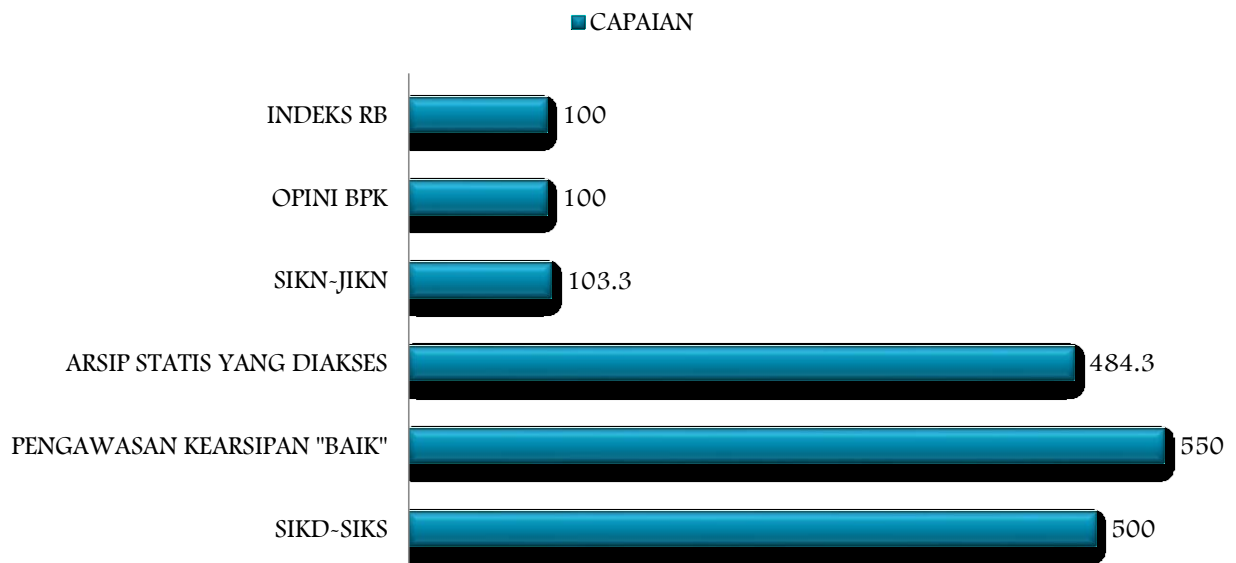
Adapun capaian kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2017 adalah sebesar 306,2 % dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

### CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	CAPAIAN (5)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	1. Prosentase Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS)	5%	25.4%
		2. Jumlah pencipta arsip dan lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	2 Instansi	11 Instansi
2.	Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan dan Pelestarian, serta Akses Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	4.673 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset	22.631 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset
3.	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional simpul jaringan dalam pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional	60 Instansi	62 Instansi
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
5.	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI	B	B
		2 Skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	B	B



## GRAFIK PROSENTASE CAPAIAN KINERJA



**P**ada Tahun Anggaran 2017 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp.227.320.826.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2016 sebesar Rp.167.978.627.000,- maka ANRI pada tahun anggaran 2017 terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.59.342.199.000,- yang dialokasikan pada 3 (tiga) program, sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.113.082.879.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 17.475.468.000,-
3. Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar Rp.96.762.479.000,-



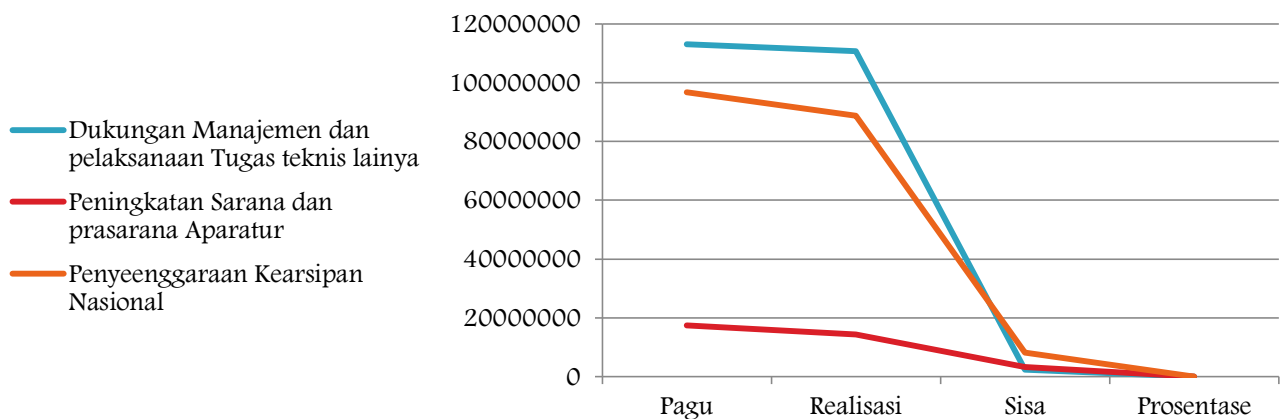


Pada Tahun 2017 ANRI telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.211.468.865.417,- (Dua ratus sebelas milyar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh belas ribu rupiah) atau sebesar 93,03 % dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp.227.320.826.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL REALISASI ANGGARAN ANRI  
TAHUN 2017**

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa	Realisasi (%)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	113.082.879,-	110.722.780,-	2.360.099,-	97,91
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	17.475.468,-	14.278.172,-	3.197.296,-	81,70
3.	Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	96.762.479,-	86.467.912,-	10.294.567,-	89,36
<b>Jumlah</b>		<b>227.320.826,-</b>	<b>211.468.865,-</b>	<b>15.851.961,-</b>	<b>93,03</b>

**GRAFIK REALISASI ANGGARAN ANRI  
TAHUN 2017**



**D**ibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2016 terdapat penurunan penyerapan anggaran pada tahun 2017 dimana pada tahun 2017 penyerapan anggaran sebesar 93,03%, sedangkan tahun 2016 penyerapan anggaran sebesar 95,92 %, hal ini terjadi disebabkan oleh :

1. Kurang tersedianya waktu untuk melakukan revisi anggaran dalam rangka optimalisasi kinerja dan anggaran.
2. Adanya kebijakan pemerintah terkait pemangkasan anggaran belanja perjalanan dinas yang sangat berdampak kepada pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengingat ruang lingkup pembinaan adalah perjalanan dinas ke daerah binaan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Adanya beberapa capaian kinerja masih terkait dengan para pihak yang harus segera diselesaikan agar capaian kinerjanya optimal.



Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat Pusat dan Daerah serta masyarakat

Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi elektronik records system

Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di Pusat dan Daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica

## MISI

Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi

Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional

Mwngembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dana jaringan informasi kearsipan

VISI 2000-2025  
"Arsip sebagai  
simpul Pemersatu  
Bangsa dalam  
Kerangka Negara  
Kesatuan Republik  
Indonesia yang  
dicapai Tahun 2025"

VISI

VISI 2015-2019  
"Arsip sebagai Pilar  
Good Governance  
dan Integrasi  
Memori Kolektif  
Bangsa"



## Integritas

Berfikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar.

Do:

1. Menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual
2. Bekerja dengan disiplin dan penuh tanggungjawab
3. Santun dalam berbicara dan berperilaku
4. Keselarasan antara kata dan perbuatan.

Don't:

1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi



## Profesional

Berwawasan ke depan dan tanggap terhadap perubahan.

Do

1. Selalu menambah ilmu pengetahuan
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
3. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif
4. Menciptakan gagasan dan ide baru yang implementatif

Don't

1. Pesimis dalam mencapai tujuan organisasi
2. **Cepat puas dengan kondisi yang ada**
3. Bersikap apatis terhadap lingkungan



## Visioner

Berwawasan ke depan dan tanggap terhadap perubahan.

Do

1. Selalu menambah ilmu pengetahuan
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
3. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif
4. Menciptakan gagasan dan ide baru yang implementatif

Don't

1. Pesimis dalam mencapai tujuan organisasi
  2. **Cepat puas dengan kondisi yang ada**
  3. Bersikap apatis terhadap lingkungan
- Membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif**

Do



## Sinergi

Membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif

Do

1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghormati
2. Menerima masukan dan kritikan yang membangun
3. Saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja
4. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan produktif antar unit kerja
5. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan koordinatif antar lembaga dan masyarakat secara harmonisasi dan produktif



## Akuntabel

Transparan dan dapat di pertanggungjawabkan

Do

1. Menaatinya peraturan perundang-undangan dan SOP
2. Menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan
3. Merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan

Don't

1. Manipulasi data dan informasi
2. Tidak bertanggung jawab

# PENDAHULUAN



## LATAR BELAKANG

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ANRI memiliki tugas pemerintahan di bidang kearsipan.

Keputusan Presiden ini telah dirubah yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ANRI dituntut untuk

melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban ANRI dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan misi

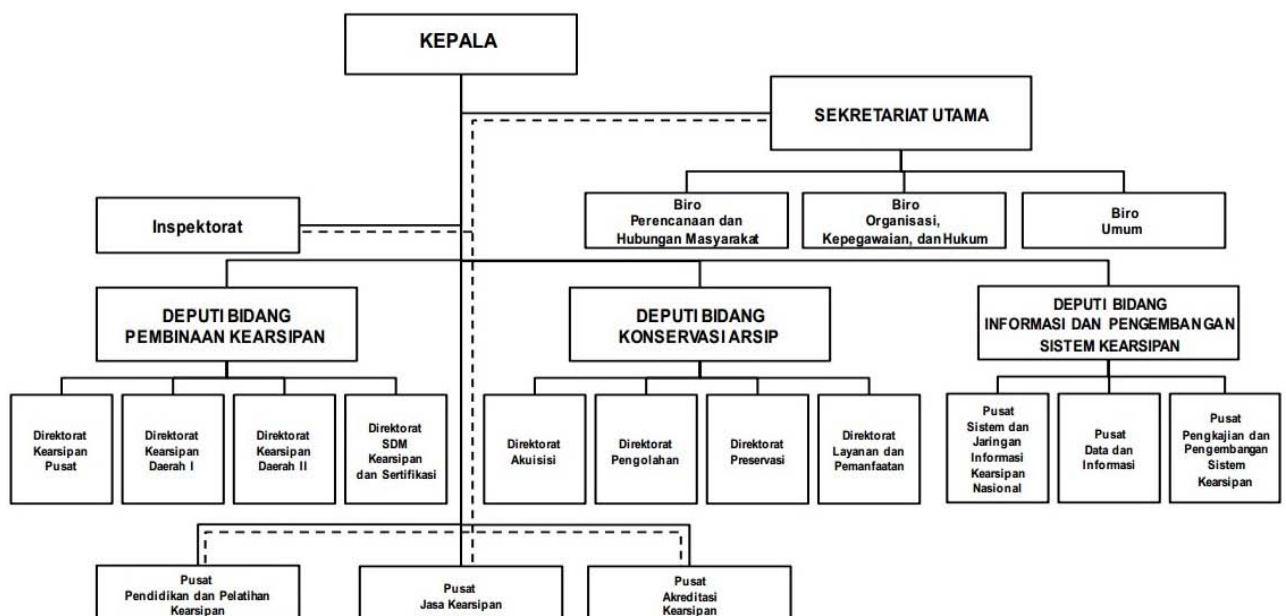
dan mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan ANRI.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## *B.* STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1395/MPANRB/04/2014 tanggal 2 April 2014 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Kepala ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI.

ANRI selanjutnya menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dengan bagan sebagai berikut:



Tugas pokok ANRI adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana tugas dan fungsi kearsipan semakin bertambah, mengharuskan penambahan fungsi-fungsi di tubuh ANRI.

Meski demikian seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, ANRI telah melakukan perampingan di beberapa unit substansi yang selama ini masih terdapat eselon IV pada unit substansi menjadi tidak ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala ANRI dibantu oleh 4 (empat) unit eselon I, dan 18 (delapan belas) unit eselon II.

Sebagaimana struktur organisasi di atas, dalam menjalankan tugasnya, ANRI didukung oleh 558 orang pegawai dari berbagai jabatan fungsional yang ada seperti Arsiparis, Pranata Komputer, Analisis Kepegawaian, Perancang Perundang-undangan, Auditor, Pranata Humas, Widyaiswara.

Pegawai ANRI tersebut ditempatkan dan tersebar ke seluruh unit kerja di lingkungan ANRI baik di Jakarta, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan di Bogor maupun di Balai Arsip Statis dan Tsunami di Aceh.



## MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di





bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala ANRI mempunyai tugas;

1. Memimpin ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas ANRI;
3. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggungjawabnya, dan;
4. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Tugas ANRI adalah melaksanakan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut ANRI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
2. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
3. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Tugas dan fungsi ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab,

terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dan Nawa Cita sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejalan dengan pencapaian agenda nasional tersebut, ANRI turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.

Adapun peran strategi yang diterapkan ANRI adalah;

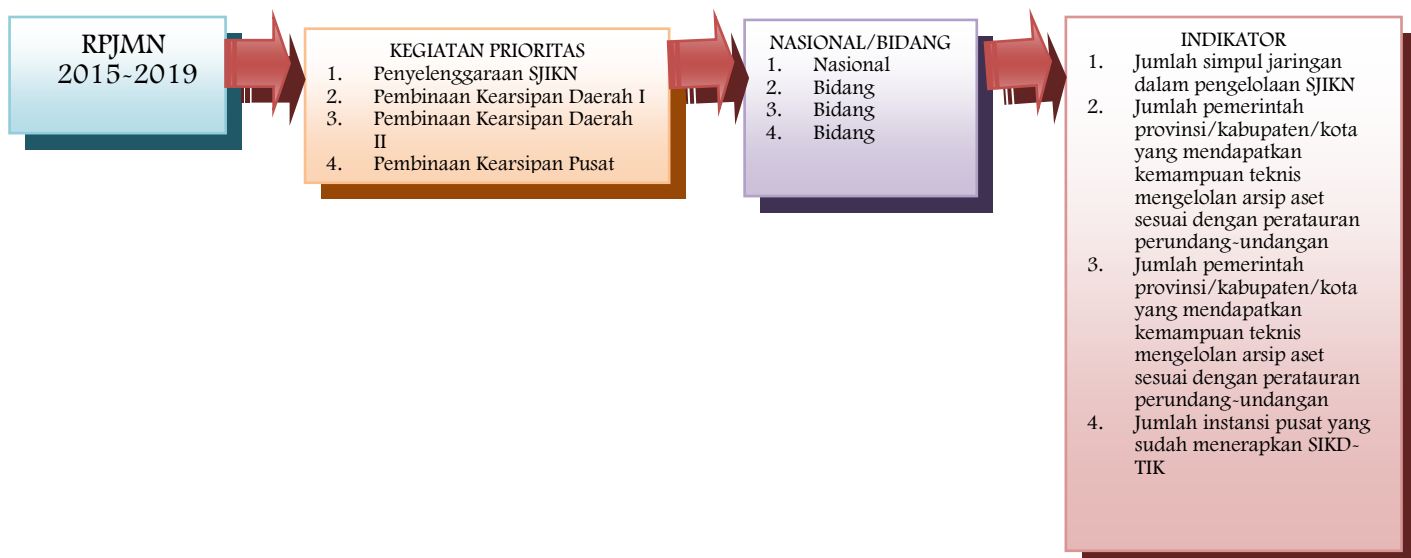
1. Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivita, pelindung kepentingan negara dan hak-hak kepeerdanaan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa

dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa;

3. Pemanfaatan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

Dalam RPJMN 2015-2019 pem bangunan kearsipan diarahkan guna mendukung tercapainya prioritas bidang aparatur negara.

Berkaitan dengan hal tersebut guna mempercepat terwujudnya prioritas dan fokus prioritas RPJMN 2015-2019, maka ditetapkan 1 (satu) prioritas Nasional dan 3 (tiga) kegiatan Prioritas Bidang sebagai berikut :



## *S* SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian LAKIP terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

### Bab 1

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja, Tugas Pokok dan Fungsi, serta struktur organisasi ANRI.



## Bab 2

Perencanaan dan Perjanjian inerja pada intinya membahas mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ANRI tahun 2017.



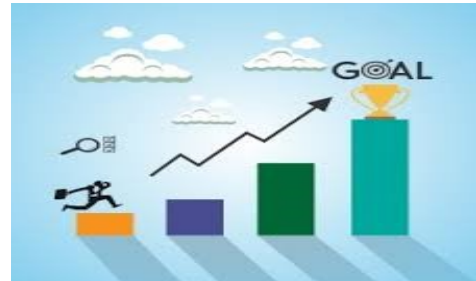
## Bab 3

Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian selama tahun 2017, serta akuntabilitas keuangan.



## Bab 4

Penutup menguraikan secara umum keberhasilan dan kegagalan, permasalahan, serta hambatan utama dalam pencapaian kinerja ANRI tahun 2017.



# PERENCANAAN KINERJA

## RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 s.d. 2019, pemerintah telah mengagendakan 9 (sembilan) agenda prioritas yang harus diwujudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya dari 9 (sembilan) agenda prioritas tersebut.



Arsip Nasional RI berperan dalam mewujudkan agenda yang ke 2 (dua) yaitu: “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”, pada

subagenda ke 3 (tiga) yaitu: “membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan”, yang selanjutnya dituangkan ke dalam arah kebijakan dan strategi berupa: Penerapan *e-government* dan Penerapan *Open Government*.


Berpedoman pada RPJMN tahun 2015 s.d. 2019 tersebut, maka Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2015 s.d. 2019 menetapkan Rencana Strategis sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 tahun 2015 tentang Rencana Strategis ANRI tahun 2015 s.d. 2019.

Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang modern berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ditetapkan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut :

- a) Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional;
- b) Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c) Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e) Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f) Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat;
- g) Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa;
- h) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sedangkan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**



- Persentase Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Prov/ Kab/ Kota dan FTN yang telah mendapatkan aplikasi pengelolaan arsip berbasis e-arsip (SIKD dan SIKS)
- Jumlah pencipta arsip dan lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “baik”
- Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat
- Jumlah lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
- Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan
- Indeks Reformasi Birokrasi ANRI
- Nilai Akuntabilitas Kinerja ANRI

yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

## B. TUJUAN

### ANRI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2015-2019, Tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional;
2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional;
3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas

penyelenggaraan kearsipan nasional.

Tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhir yaitu: “terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional”.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut di antaranya adalah aspek:

- a) kelembagaan,
- b) organisasi,
- c) ketatalaksanaan,
- d) pengawasan,
- e) SDM yang berkualitas
- f) sumber daya, sarana dan prasarana,
- g) anggaran yang memadai.

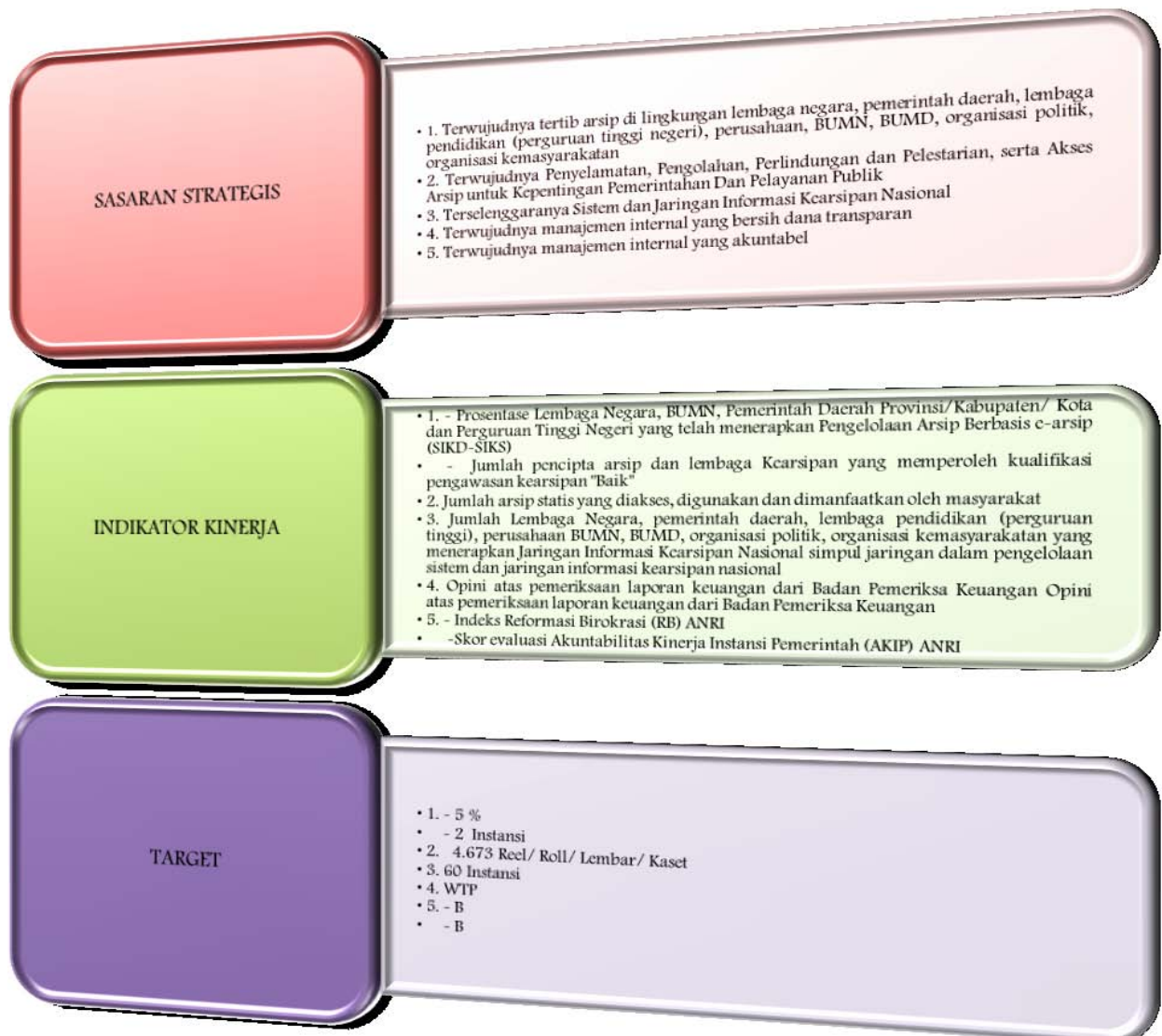




## SASARAN STRATEGIS

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, ANRI tahun 2015 s.d. 2019 menyusun sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran strategis yaitu Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi



kemasyarakatan, dan perseorangan.

b. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional, ditetapkan sasaran strategisnya yaitu Terwujud nya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik.

c. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, ditetapkan Sasaran strategis yaitu Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Terwujudnya manajemen internal yang profesional, bersih dan akuntabel dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional, ditetapkan Sasaran strategis yaitu :

Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan, serta terwujudnya manajemen internal yang akuntabel.



## PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:

- a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;



- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari Rencana strategis tahun 2015-2019.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan IKU disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait. Semakin bersifat *outcome* atau *impact*. semakin rendah posisi pejabat/pegawai yang bersangkutan, IKU yang dimiliki semakin bersifat aktivitas atau input. Kualitas IKU juga sangat tergantung kepada besarnya coverage IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis.

Semakin besar *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis, semakin bernilai *exact*.

Sebaliknya, semakin kecil coverage IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis, semakin bersifat *activity*.



# A KUNTABILITAS KINERJA



## A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dilakukan dengan membandingkan realisasi yang telah dicapai dalam setiap indikator sasaran. Secara keseluruhan, capaian kinerja ANRI Tahun 2017 dinyatakan berhasil yaitu mencapai lebih dari 100 % dari target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2017, ANRI telah menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 5 sasaran. Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, kesemua

indikator dinyatakan berhasil, karena capaiannya melebihi dari 100%.

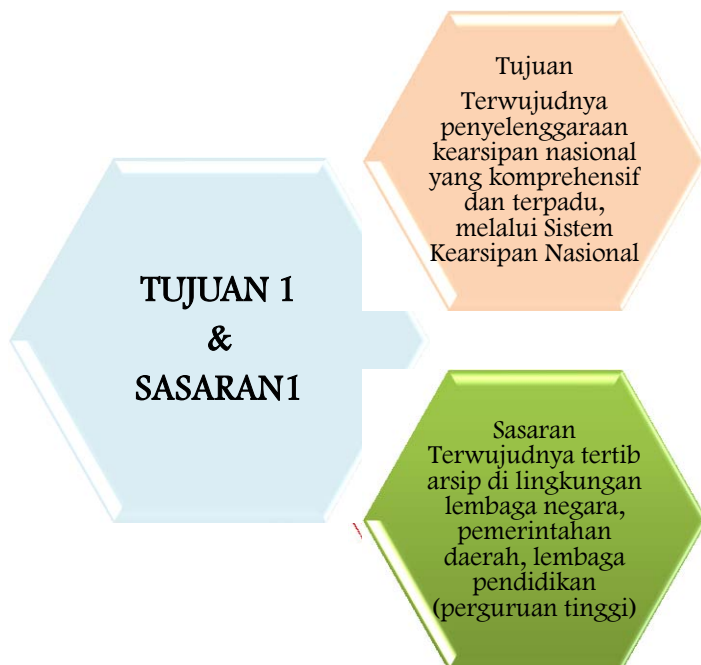
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kearsipan yang efektif dan efisien, pada Tahun 2017 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan (BUMN/ BUMD), organisasi politik, organisasi kemasyarakatan.
2. Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Pelindungan dan Pelestarian, serta Akses Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

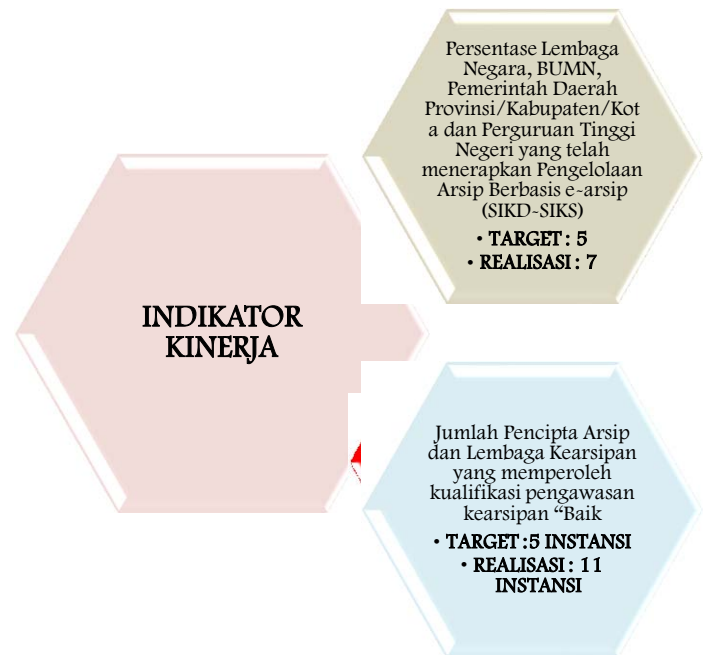
4. Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan
5. Terwujudnya Manajemen internal yang akuntabel

Pengukuran tingkat capaian kinerja ANRI dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2017 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja ANRI Tahun 2017 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:



Sasaran ini diukur dari 2 (dua) indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut:



Uraian dari indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Prosentase Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS).

Langkah percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan ANRI melalui salah satu program yang ditetapkan adalah *Electronic Government (E-Government)*.

Sejalan dengan program tersebut, ANRI telah menetapkan implementasi e-arsip dalam bentuk kegiatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan

Sistem Informasi Kearsipan Statis - TIK. (SIKD/SIKS - TIK), Dapat kami sampaikan bahwa penerapan SIKD/SIKS TIK merupakan salah satu prioritas bidang yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 - 2019.



Dengan diterapkannya SIKD/SIKS - TIK diharapkan pengelolaan arsip dinamis dan statis dapat berjalan maksimal dengan hasil yang efisien, efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan indikator ini, maka pengelolaan arsip berbasis teknologi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan terpadu perlu dilaksanakan sehingga pengelolaan arsip yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi, mudah diakses, sesuai dengan peraturan perundangan dan standar kearsipan.

Pada tahun 2017 ANRI menargetkan instansi yang menerapkan pengelolaan e-arsip (SIKD/SIKS berbasis TIK) sebanyak 5% atau 11 instansi dan terealisasi sebanyak 63 instansi dari target sebanyak 224 instansi yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.

Capaian ini menunjukkan angka 34, 13% dari yang ditargetkan pada tahun 2017 yaitu sebesar 5% atau 11 instansi yang ditargetkan.

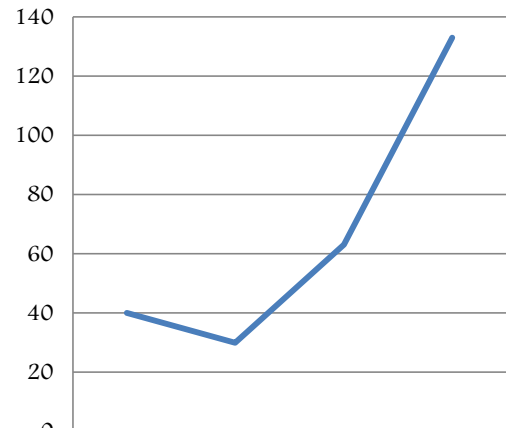
Pencapaian penerapan pengelolaan arsip berbasis e-arsip (SIKD-SIKS berbasis TIK) dilakukan melalui

*Pada tahun 2017 ANRI menargetkan instansi yang menerapkan pengelolaan e-arsip (SIKD/SIKS berbasis TIK) sebanyak 5 % atau 11 instansi dan terealisasi 63 instansi dari target sebanyak 224 instansi yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.*

kegiatan survei pengenalan implementasi, bimbingan teknis penyusunan instrumen aplikasi, pendampingan penyusunan instrumen, bimbingan dan serah terima aplikasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi.

Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2019 sebesar 50% dari jumlah K/L pemerintah daerah provinsi/ kota, maka capaian sampai dengan tahun 2017 sudah sebanyak 133 instansi .

Dalam rangka lebih mengintensifkan penerapan pengelolaan arsip berbasis e-arsip, salah satu instrument yang diperlukan adalah setiap instansi memiliki instrumen Jadwal retensi Arsip (JRA), yang akan dipergunakan bagi setiap instansi dalam melakukan penyusutan arsipnya dan juga sebagai instrumen yang harus ada dalam mengelola arsip dengan menggunakan aplikasi SIKD- SIKS berbasis TIK.



	2015	2016	2017	JUMLAH
INSTANSI YANG TELAH MENERIMA SIKD	40	30	63	133

Pada tahun 2017 ANRI telah memberikan persetujuan JRA sebanyak 111 yang berasal dari lembaga negara, BUMN/BUMD, pemerintah daerah maupun perguruan tinggi negeri dan swasta.

- Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik”.



*Pada tahun 2017 ANRI telah memberikan persetujuan JRA sebanyak 111 yang berasal dari lembaga negara, BUMN/BUMD, pemerintah daerah maupun perguruan tinggi negeri dan swasta.*

Dalam menghadapi globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan yang baik dan bersih,



serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah,

harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan

*Tahun 2017 ANRI menargetkan Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik” sebanyak 2 instansi. Capaian dari indikator ini terdapat 11 instansi yang dinyatakan “baik” (1 diantaranya dinyatakan Sangat baik) atau tercapai 550 %.*

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan

kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan



**Sambutan Kepala ANRI, Mustari Irawan dalam acara Pembukaan Sosialisasi Akreditasi dan Pengawasan Kearsipan serta Rakor Pembahasan Variabel Bid. Kearsipan**



merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

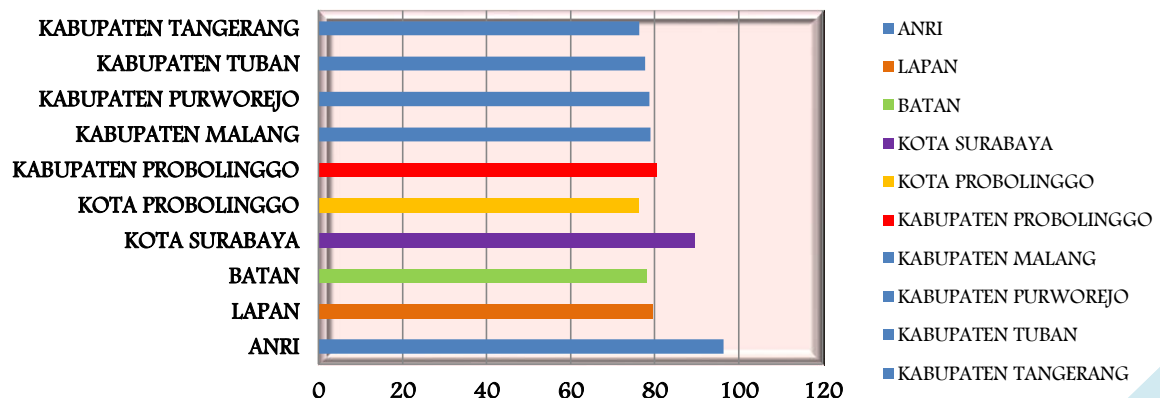
Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip.

Audit kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu audit kearsipan eksternal dan audit kearsipan internal. Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip.

Audit kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif dan atau pengelolaan arsip statis, aspek penyusutan, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan.

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN



Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Instrumen Audit Kearsipan, telah ditetapkan standar penilaian untuk melakukan pengawasan kearsipan dengan rincian/ kategori sebagai berikut :

- a. Nilai 91 s.d 100 dengan kategori “sangat baik”
- b. Nilai 76 s.d 90 dengan kategori “baik”
- c. Nilai 61 s.d 75 dengan kategori “cukup”
- d. Nilai 51 s.d 60 dengan kategori “kurang”
- e. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “buruk”

Pada tahun 2017, ANRI melakukan pengawasan kearsipan eksternal baik di tingkat pusat maupun di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota.



ANRI menargetkan Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik” sebanyak 2 instansi.

Capaian dari indikator ini terdapat 11 instansi yang dinyatakan “baik” (1 diantaranya dinyatakan Sangat baik). Adapun ke 11 (sebelas) instansi tersebut sebagaimana tabel dibawah ini :

TABEL INSTANSI/LEMBAGA YANG TELAH MENDAPATKAN PREDIKAT PENGAWASAN KEARSIPAN “BAIK”

NO	LPNK/KABUPATEN/KOTA	NILAI	KATEGORI
1	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	96,36	SANGAT BAIK
2	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	79,51	BAIK
3	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	78,17	BAIK
4	Kota Surabaya	89,71	BAIK
5	Kabupaten Probolinggo	80,38	BAIK
6	Kabupaten Hulu Sungai Utara	80,14	BAIK
7	Kabupaten Malang	78,95	BAIK
8	Kabupaten Purworejo	78,71	BAIK
9	Kabupaten Tuban	77,75	BAIK
10	Kota Probolinggo	76,56	BAIK
11	Kabupaten Tangerang	76,32	BAIK

Pada tahun 2017, terdapat peningkatan capaian sebesar 550% instansi yang mempunyai kualifikasi pengawasan kearsipan “baik” apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, dimana pada tahun 2016 yang memiliki kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik” sebanyak 2 instansi yaitu : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Sekretariat Negara RI.



Apabila dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 10 instansi yang mendapatkan kualifikasi pengawasan “baik”, maka capaian sampai dengan tahun 2017 ini sudah melebihi dari yang ditargetkan yaitu sudah mencapai 130%.

Sasaran ini diukur dari indikator kinerja dengan target dan realisasi sebagai berikut:



**Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat**

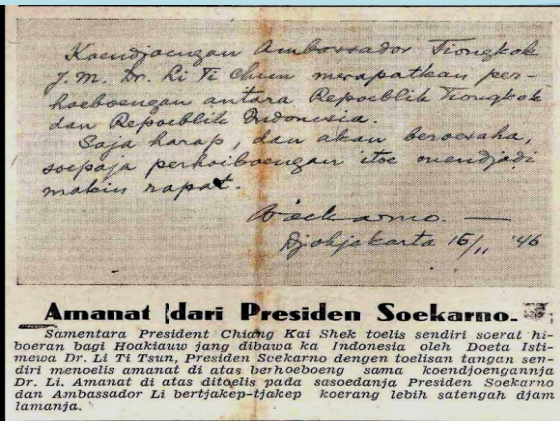
- TARGET 4.673 LEMBAR/ML/ROLL/KASET
- REALISASI 22.631 LEMBAR/ML/ROLL/KASET
- PROSENTASE 484.3 %

Dalam rangka melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan utama pada lembaga kearsipan adalah mengembangkan dan menambah khasanah arsip statis.

ANRI melalui kebijakan pengelolaan arsip statis telah mengembangkan kebijakan akuisisi arsip terhadap lembaga negara, perusahaan, organisasi politik/ organisasi masyarakat, dan perseorangan yang implementasinya telah dan sedang berjalan sampai dengan saat ini.

Kebijakan ini akan membangun khazanah arsip dan menangkap periode penting dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga dengan penambahan khazanah arsip akan menciptakan memori kolektif bangsa (*the making of collective memory*) sebagai perwujudan dari visi ANRI, yaitu :

“Arsip yaitu sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif bangsa”.



Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, outcome dari Sistem Kearsipan Nasional (SKN) selain akan dicapai dengan pembinaan terhadap penerapan pengelolaan arsip (*archival management*) sesuai dengan peraturan kearsipan, organisasi, dan Sumber Daya Manusia, juga akan dicapai melalui penyelamatan (*acquisition*), pengolahan (*arrangement and description*), pelestarian (*conservation-preservation*), akses (*access*), dan pemanfaatan arsip.

Untuk memenuhi tujuan ini, ANRI menjalankan kegiatan penyelamatan

arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/ Orpol/ Perseorangan dan Arsip Kepresidenan.

Kegiatan ini dijalankan dengan melakukan penelusuran, pendataan, penilaian, dan penarikan arsip (akuisisi arsip) instansi pemerintah, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, BUMN, perusahaan Swasta/ Ormas/ Orpol/ Perorangan dan Arsip Kepresidenan serta untuk menambah kekayaan akan arsip statis juga dilakukan wawancara terhadap tokoh nasional/ pelaku sejarah.

Arsip-arsip yang telah diselamatkan selanjutnya dilakukan pengolahan di ANRI berdasarkan *provenance*, yang dilanjutkan dengan proses pengolahan, penyusunanguide arsip, inventaris arsip, serta menyusun daftar arsip guna penemuan kembali arsip bila diperlukan.



Penambahan khasanah arsip di ANRI banyak didominasi berdasarkan jenis arsip foto, hal ini disebabkan karena arsip foto dalam setiap kegiatan yang dilakukan jenis arsip foto lebih banyak tercipta, mudah dan langsung dapat dilihat hasilnya.



Penambahan selanjutnya diikuti jenis *optical disk*, arsip rekaman suara dan arsip kertas. Sedangkan media dalam bentuk lainnya hanya sedikit penambahannya, bahkan juga terdapat arsip dalam media bentuk lainnya yang tidak ditemukan seperti mikrofilm, mikrofische, piringan hitam, dll.

Jumlah khasanah arsip ANRI pada saat ini dan perbandingan dengan jumlah khasanah sebelumnya berdasarkan berbagi bentuk dan media dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Khasanah arsip yang ada di ANRI tersebut diatas dapat diakses kepada masyarakat

	<b>Kertas</b> • Tahun 2016 : 29.918,60 meter linier • Tahun 2017 : 29.995,60 meter linier
	<b>Poster</b> • Tahun 2016 : 332 lembar • Tahun 2017 : 336 lembar
	<b>Kartografi/Peta</b> • Tahun 2016 : 128592 lembar • Tahun 2017 : 13344 lembar
	<b>Foto</b> • Tahun 2016 : 3.445.452 lembar • Tahun 2017 : 3.460.796 lembar
	<b>Film</b> • Tahun 2016 : 59.002 reel • Tahun 2017 : 59.002 reel
	<b>Mikrofilm</b> • Tahun 2016 : 14.463 roll • Tahun 2017 : 14.463 roll
	<b>Mikrofische</b> • Tahun 2016 : 14.262 Fische • Tahun 2017 : 14.262 Fische
	<b>Rekaman suara</b> • Tahun 2016 : 45.135 Kaset • Tahun 2017 : 45.445 Kaset
	<b>Reel to reel sound</b> • Tahun 2016 : 946 reel • Tahun 2017 : 946 reel
	<b>Video</b> • Tahun 2016 : 25.324 kaset • Tahun 2017 : 25.349 kaset
	<b>Optical Disk</b> • Tahun 2016 : 10.073 keping • Tahun 2017 : 15.897 keping
	<b>Piringan Hitam</b> • Tahun 2016 : 101 keping • Tahun 2017 : 101 keping
	<b>Flasdisk</b> • Tahun 2016 : 1 buah • Tahun 2017 : 1 buah

umum, mahasiswa dan pelajar, instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta, kepolisian dan LSM guna keperluan kegiatan pemerintahan, penelitian, dll.

Adapun jumlah arsip statis yang diakses,

*Tidak adanya penambahan khasanah arsip tersebut diakibatkan perkembangan teknologi yang sangat cepat, maka data atau dokumen yang tercipta kebanyakan dalam bentuk elektronik.*

digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2017 sebesar 22.631 lembar/reel/roll/lembar/kaset. Perbandingan jumlah arsip yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan tahun 2015 sampai dengan 2017 terinci sebagai berikut:



Adapun rincian arsip yang diakses oleh pengguna pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Arsip Konvensional

Arsip Konvensional yang dimanfaatkan oleh pengguna pada tahun 2017 adalah arsip periode kolonial, arsip periode republik dan arsip kartografi sebagaimana tabel berikut:

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH
1	Arsip periode kolonial	4.898 lembar
2	Arsip periode republik	7.441 lembar
3	Arsip kartografi	630 lembar
<b>JUMLAH</b>		<b>12.969 lembar</b>

Tabel penggunaan arsip konvensional

Sumber: Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, ANRI

Penggunaan arsip periode republik pada tahun 2017 memiliki jumlah tertinggi dibandingkan dengan penggunaan arsip periode Hindia Belanda dan Republik. Hal ini disebabkan karena adanya kecenderungan peneliti lebih banyak melakukan penelitian pada periode republik atau tema sejarah kontemporer. Sedangkan penggunaan arsip kartografi atau kearsitekturan tidak terlalu tinggi diakibatkan khasanah arsip kartografi yang ada di ANRI volumenya tidak sebanyak arsip tektual.

b. Arsip Media Baru

Pemanfaatan arsip media baru di ANRI pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

NO	KHASANAH	JUMLAH
1	Arsip foto	8.558 lembar
2	Arsip film	528 reel/roll
3	Arsip Mikrofilm	448 reel/roll
4	Arsip Rekaman suara	21 kaset
<b>JUMLAH</b>		<b>9.662 lembar/reel/roll/kaset</b>

Penggunaan arsip media foto lebih banyak digunakan oleh peneliti karena dapat langsung dapat terlihat secara visual melalui fisik arsip atau hasil alih mediana.

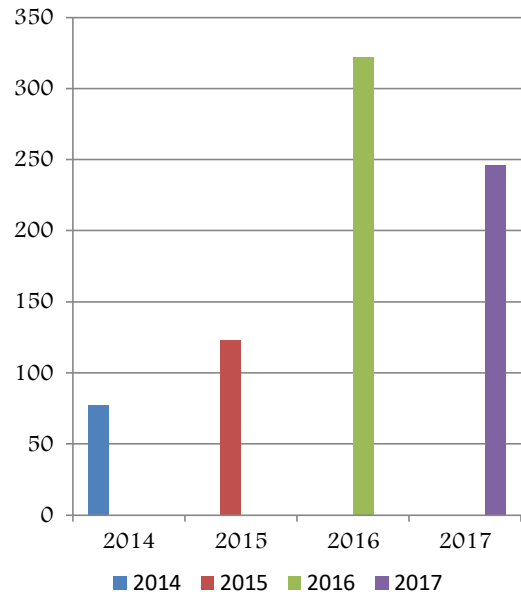
Sedangkan jumlah pengguna yang menggunakan arsip di ANRI tahun 2017 beserta perbandingannya dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

NO	TAHUN	PENGGUNA DALAM NEGERI	PENGGUNA LUAR NEGERI	JUMLAH
1	2015	4.894 orang	321 orang	5.215 orang
2	2016	4.492 orang	255 orang	4.747 orang
3	2017	3.555 Orang	172 Orang	3.723 orang

Selain melakukan penyelamatan arsip, ANRI juga memberikan rekomendasi pemusnahan arsip yang dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

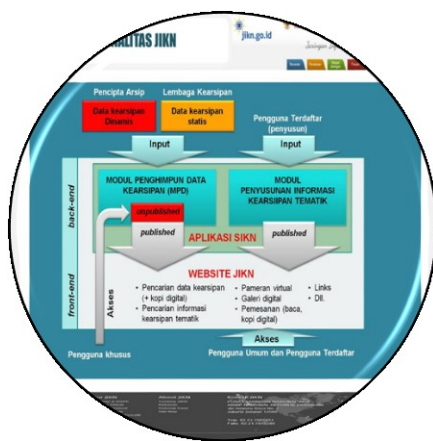
ANRI tahun 2017 memberikan persetujuan pemusnahan arsip pada 246 instansi. Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Persetujuan pemusnahan arsip diberikan kepada Instansi di pusat maupun daerah.

#### PERKEMBANGAN PEMUSNAHAN ARSIP DARI INSTANSI PUSAT DAN DAERAH



Dalam pencapaian strategis ini, dipantaunya melalui indikator jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, dengan target dan capaian sebagai berikut:

bergabung serta jumlah data dan informasi kearsipan yang dimasukkan oleh simpul jaringan ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) serta mendorong simpul jaringan yang telah ada untuk meningkatkan jumlah dan kualitas informasi kearsipannya dalam SIKN dan JIKN.



Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

- **TARGET : 60 Instansi**
- **REALISASI : 62 Instansi**
- **PROSENTASE : 103.3 %**

Jumlah informasi kearsipan yang dapat diakses oleh publik merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong tercapainya tujuan ANRI untuk menyediakan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dalam mendukung *open government*. Untuk meningkatkan jumlah informasi

Terkait dengan sasaran peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dengan target 60 instansi/simpul jaringan pada tahun 2017, ANRI melaksanakan program pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dengan melaksanakan kegiatan:



- a. Pengelolaan Data dan Informasi SIKN dan JIKN
- b. Pengelolaan Website JIKN
- c. Rapat koordinasi nasional SIKN dan JIKN
- d. Sosialisasi SIKN dan JIKN
- e. Pengelolaan *Helpdesk* Nasional
- f. Implementasi SIKN dan JIKN

kearsipan, hal ini sangat ditentukan oleh jumlah simpul jaringan yang telah

- g. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN
- h. Penyewaan dan Penyimpanan Arsip Online ANRI dan Fasilitas Pendukung SIKN dan JIKN.
- i. Pengembangan Infrastruktur Cadangan Kontinuitas Layanan SIKN dan JIKN.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis ANRI tahun 2015 s.d. 2019 ANRI menargetkan sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 255 instansi yang akan bergabung menjadi simpul jaringan.

Dengan adanya tambahan anggaran di tahun 2017, yang sebelumnya mempunyai target 45 instansi, maka

*Tahun 2017 ANRI berhasil menghimpun 62 instansi/simpul jaringan baru dari target sebanyak 60 simpul jaringan yang bergabung dalam SIKN dan JIKN. Capaian ini berarti melebihi dengan jumlah yang ditargetkan dalam RPJMN atau tercapai 103.3%.*



Pada tahun 2017 ANRI berhasil menghimpun 62 instansi/simpul jaringan baru dari target sebanyak 60 simpul jaringan yang bergabung dalam SIKN dan JIKN.

Capaian ini berarti melebihi dengan jumlah yang ditargetkan dalam RPJMN atau tercapai 103.3%.

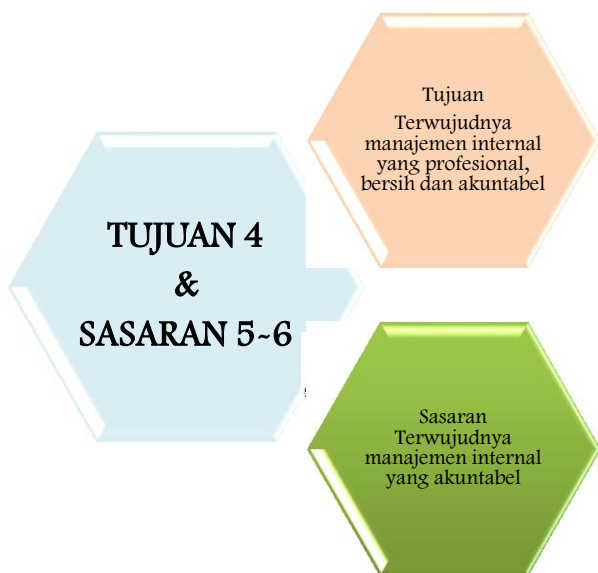
Perbandingan jumlah simpul jaringan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH SIMPUL
1	2015	34 simpul
2	2016	39 simpul
JUMLAH		135 simpul

targetnya bertambah menjadi 60 instansi. Dengan penambahan target ini, maka terjadi penambahan target yang ingin dicapai tahun 2019 yang semula 255 instansi menjadi sebesar 270 instansi/simpul jaringan.

Dengan capaian sampai dengan tahun 2017 sebanyak 135 instansi yang bergabung dalam simpul jaringan, maka sampai dengan tahun ke-3 periode Renstra tahun 2015 s.d. 2019 telah tercapai sebesar 50%.

**Sasaran terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan,** dipantau melalui indikator Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan target dan realisasi sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK	WTP	WTP	100 %

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima pada Tahun 2017 ANRI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan ANRI Nomor: 36A/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Berikut kami sampaikan opini dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan ANRI yang diterima dari Tahun 2015 s.d. 2017

NO	TAHUN HASIL PEMERIKSAAN	OPINI
1	Tahun 2015	WDP
2	Tahun 2016	WTP
3	Tahun 2017	WTP

ANRI pada tahun 2015 mendapatkan opini atas Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Selanjutnya pada tahun 2016, ANRI berkomitmen untuk kembali memperbaikinya dengan target WTP.

Target WTP terpenuhi pada tahun 2016 setelah ANRI berkomitmen tinggi untuk memperbaikinya dengan melakukan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, dan melakukan Efektifitas SPIP (Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah). Pada tahun 2017 ANRI kembali mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

**Sasaran Terwujudnya Manajemen internal yang akuntabel**, dipantau melalui 2 (dua) indikator dengan target dan realisasi sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI	B	72.04	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	B	B	100%



## 1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI

Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat.



Dalam program ini dilakukan berbagai penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Hadirnya program reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kehadiran reformasi birokrasi diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 s.d. 2025 yang akan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam program reformasi birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang terdiri dari organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik.

Memperhatikan kondisi tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan turut ikut serta dalam program reformasi birokrasi pemerintah.

Dalam reformasi birokrasi, ANRI berperan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu, mampu menjamin penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut guna mendukung kepentingan manajemen pemerintahan dan pembangunan.



Keberadaan arsip merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendorong

peningkatan kualitas kinerja serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

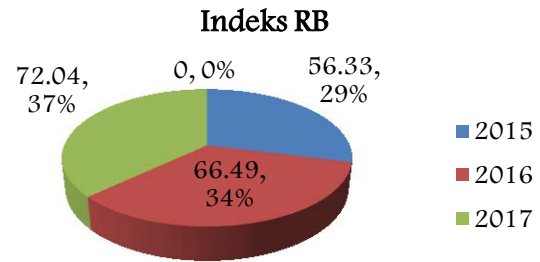
Dalam menerapkan program reformasi birokrasi, Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan proses perubahan secara bertahap.

Hal ini disebabkan program reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi 4 (empat) bagian (triwulan) sehingga dapat terlihat perkembangannya.

Selain itu, penerapan upaya tersebut tidak luput dari kekurangan sehingga perlu adanya evaluasi guna melakukan penyempurnaan di tahun selanjutnya.

Berikut kami sampaikan indeks RB ANRI berdasarkan tahun penilaian tahun 2015 s.d. 2017

NO	TAHUN PENILAIAN	INDEKS RB ANRI
1.	2015	56.93
2.	2016	66.49
3.	2017	72.04



Indeks RB ANRI dari tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan karena ANRI program kerjanya sudah mengacu pada indikator penilaian RB yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB.

### 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja ANRI yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2017, ANRI mendapatkan predikat B dengan nilai sebesar 62.23. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0.2 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi ini didasarkan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/559/M.AA.05/2017 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.

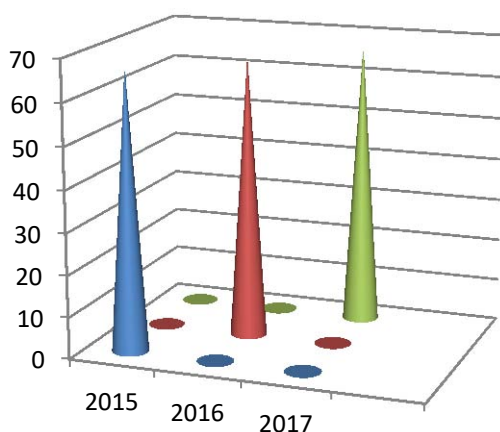
Meningkatnya nilai SAKIP ANRI dibanding tahun sebelumnya karena ANRI sudah melaksanakan apa yang telah

diberikan rekomendasi dari kementerian PAN dan RB. Hal-hal yang telah dilaksanakan yaitu menindaklanjutinya dengan penyempurnaan : rencana strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, mengembangkan pengumpulan data kinerja dengan bantuan teknologi informasi, menjabarkan IKU Organisasi sampai pada level individu, serta kesemuanya telah didukung oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen baik di intern ANRI maupun di luar ANRI termasuk masyarakat, perseorangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Berikut kami sampaikan capaian hasil evaluasi akuntabilitas ANRI tahun 2015 s.d. 2017:

NO	TAHUN	NILAI ANRI
1.	Tahun 2015	66.31
2.	Tahun 2016	66.21
3.	Tahun 2017	66.23

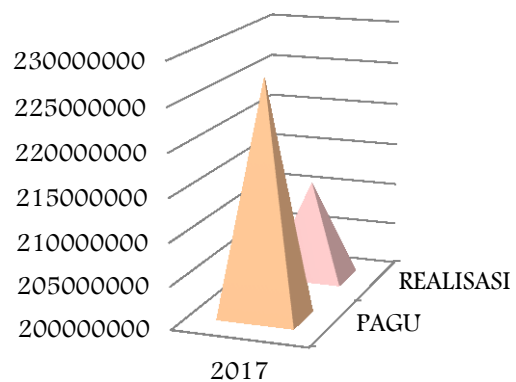
TABEL AKUNTABILITAS ANRI



## REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp211.468.865.417,- (dua ratus sebelas milyar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh belas rupiah) atau 93.03% dari pagu anggaran sebesar

### REALISASI ANGGARAN



■ PAGU ■ REALISASI

Rp227.320.826.000,00 (Dua ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Apabila dibandingkan dengan capaian output pada tahun 2017 sebesar lebih dari 100%, menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran.

Efisiensi anggaran tersebut pada umumnya berasal dari:

1. Efisiensi pengadaan barang dan jasa
2. Adanya tumpang tindih tugas dan fungsi pada Lembaga Kearsipan di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, sehingga kegiatan tidak dilaksanakan
3. Anggaran yang sudah ditargetkan menjadi penerimaan negara bukan pajak, tidak dilaksanakan karena instansi yang akan melakukan kerjasama tidak jadi melaksanakan kerjasama dengan Pusat jasa Kearsipan ANRI sebagai salah unit penghasil pendapatan bukan pajak

Disamping anggaran yang berasal dari APBN, ANRI juga menerima dana hibah dari *The Cort Foundation*. Dana hibah langsung bentuk barang sebesar

Rp2.110.306.163,00 (dua milyar seratus sepuluh juta tiga ratus enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dipergunakan untuk untuk kegiatan preservasi arsip VOC.

Hasil dari kegiatan preservasi arsip VOC berupa digitalisasi arsip dari tahun 2011 s.d. 2017 dengan seri sebagai berikut:

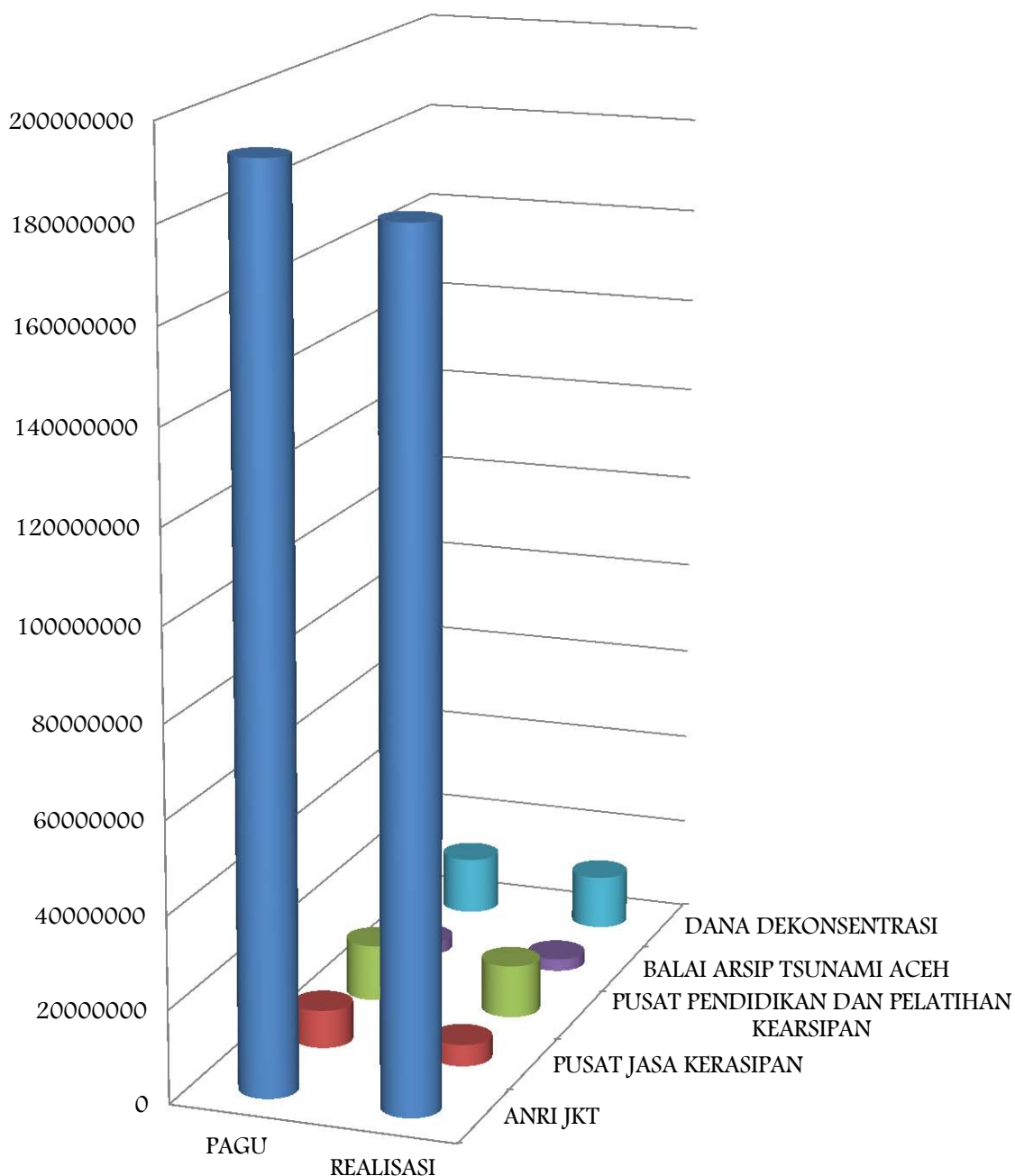
1. *Seri of dagresister* sejumlah 85.150 lembar (*image*) 141 GB jpeg file (2013)
2. *Seri of Resolutieboeken* sejumlah 233.066 lembar (*image*) 346 GB jpeg file (2014)
3. *Seri of Inlandse Vorsten* sejumlah 14.061 lembar (*image*) 15.5 GB jpeg file (2015)
4. *Seri of Bijlagen Generale Resoluties* sejumlah 573.092 lembar (*image*) 634 GB jpeg file (2016 s.d. 2017).



**TABEL REALISASI ANGGARAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017**

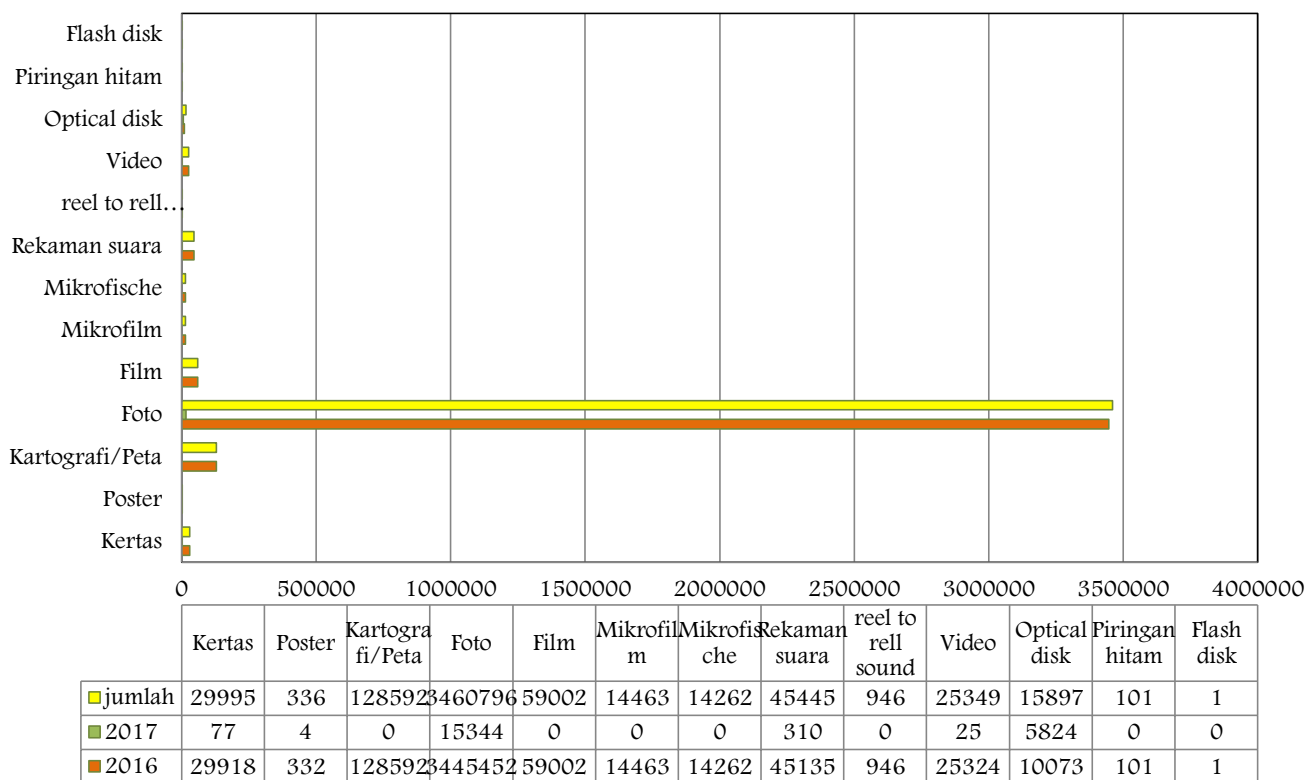
Kode	Uraian	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
<b>087.01.01</b>	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia</b>	<b>113.082.879.000</b>	<b>109.867.747.174</b>	<b>97,16</b>
3614	Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan ANRI	5.313.904.000	5.145.776.268	96,84
3615	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Ketatausahaan Pimpinan serta Hubungan Masyarakat di Lingkungan ANRI	6.516.600.000	6.339.089.970	97,28
3616	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas ANRI	100.452.375.000	97.610.751.696	97,17
3617	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ANRI	800.000.000	772.129.240	96,52
<b>087.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI</b>	<b>17.475.468.000</b>	<b>14.278.172.123</b>	<b>81,70</b>
3618	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan ANRI	17.475.468.000	14.278.172.123	81,70
<b>087.01.06</b>	<b>Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional</b>	<b>96.762.479.000</b>	<b>88.623.280.694</b>	<b>91,59</b>
5356	Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	3.912.200.000	3.650.148.420	93,30
3622	Pembinaan Kearsipan Pusat	7.030.693.000	6.602.034.620	93,90
5358	Pembinaan Kearsipan Daerah I	2.770.150.000	2.539.376.000	91,67
5359	Pembinaan Kearsipan Daerah II	1.449.630.000	1.418.949.931	97,88
5357	Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan Dan Sertifikasi	1.984.951.000	1.947.382.847	98,11
3625	Preservasi Kearsipan	25.909.128.000	24.610.703.758	94,99
3624	Pengolahan Arsip Statis	2.773.833.000	2.753.563.730	99,27
3620	Penilaian dan Akuisisi Arsip	2.927.980.000	2.707.551.080	92,47
3623	Pemanfaatan Arsip	4.173.742.000	4.117.407.280	98,65
3629	Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	2.471.845.000	2.406.221.802	97,35
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	5.087.622.000	4.724.280.935	92,86
5361	Pengelolaan Data Dan TIK ANRI	1.207.390.000	1.179.695.874	97,71
3626	Peningkatan Jasa Sistem dan Perawatan Arsip	8.095.234.000	4.551.799.120	56,23
3627	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	12.098.819.000	11.299.855.511	93,40
3623	Balai Arsip Tsunami Aceh (BATA) - KD	2.633.060.000	2.576.669.011	97,86
5356	Dana Dekonsentrasi Kearsipan (33 Daerah Provinsi) - DK	12.236.202.000	11.537.640.775	94,29
<b>JUMLAH</b>		<b>227.320.826.000</b>	<b>211.468.865.417</b>	<b>93,03</b>

**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017  
PER SATKER**

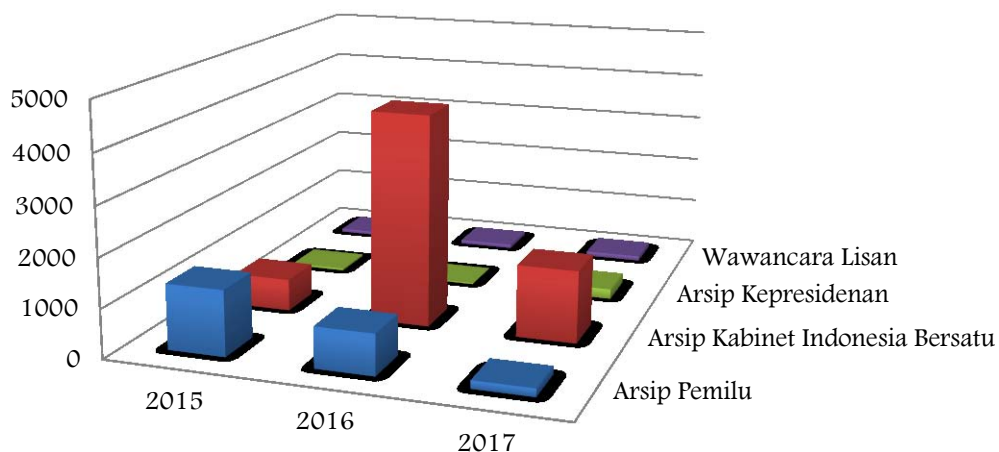


	PAGU	REALISASI
■ ANRI JKT	192255511	181645088
■ PUSAT JASA KERASIPAN	8098234	4551799
■ PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEARSIPAN	12098819	11299855
■ BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH	2633060	2576669
■ DANA DEKONSENTRASI	12236202	11537640

**TABEL PERKEMBANGAN KHASANAH ARSIP BERDASARKAN MEDIA SIMPAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2017**

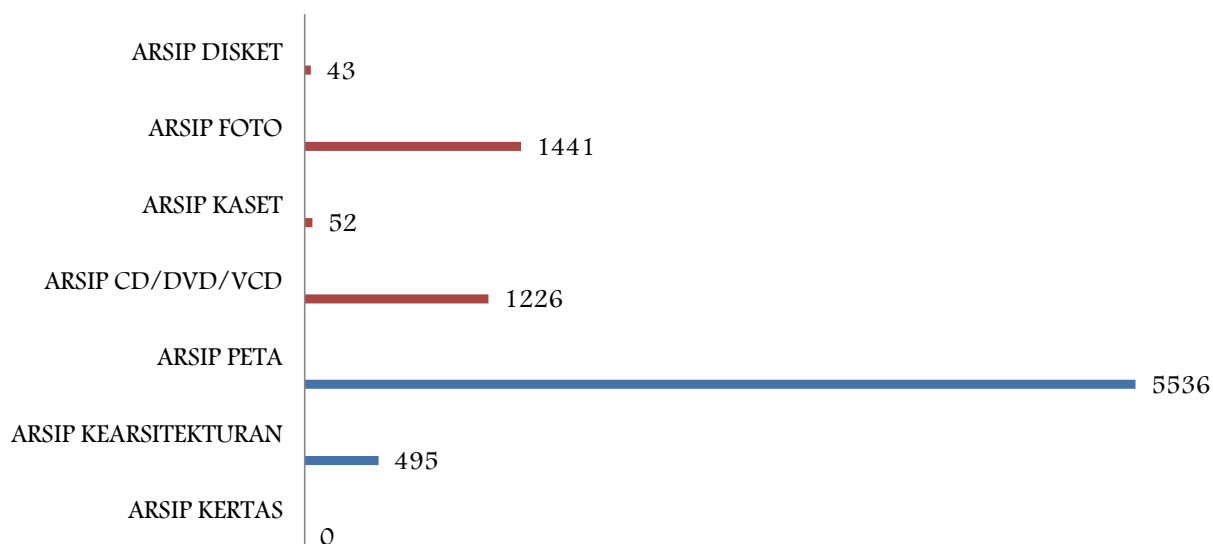


**TABEL PERKEMBANGAN KHASANAH ARSIP HASIL AKUISISI**

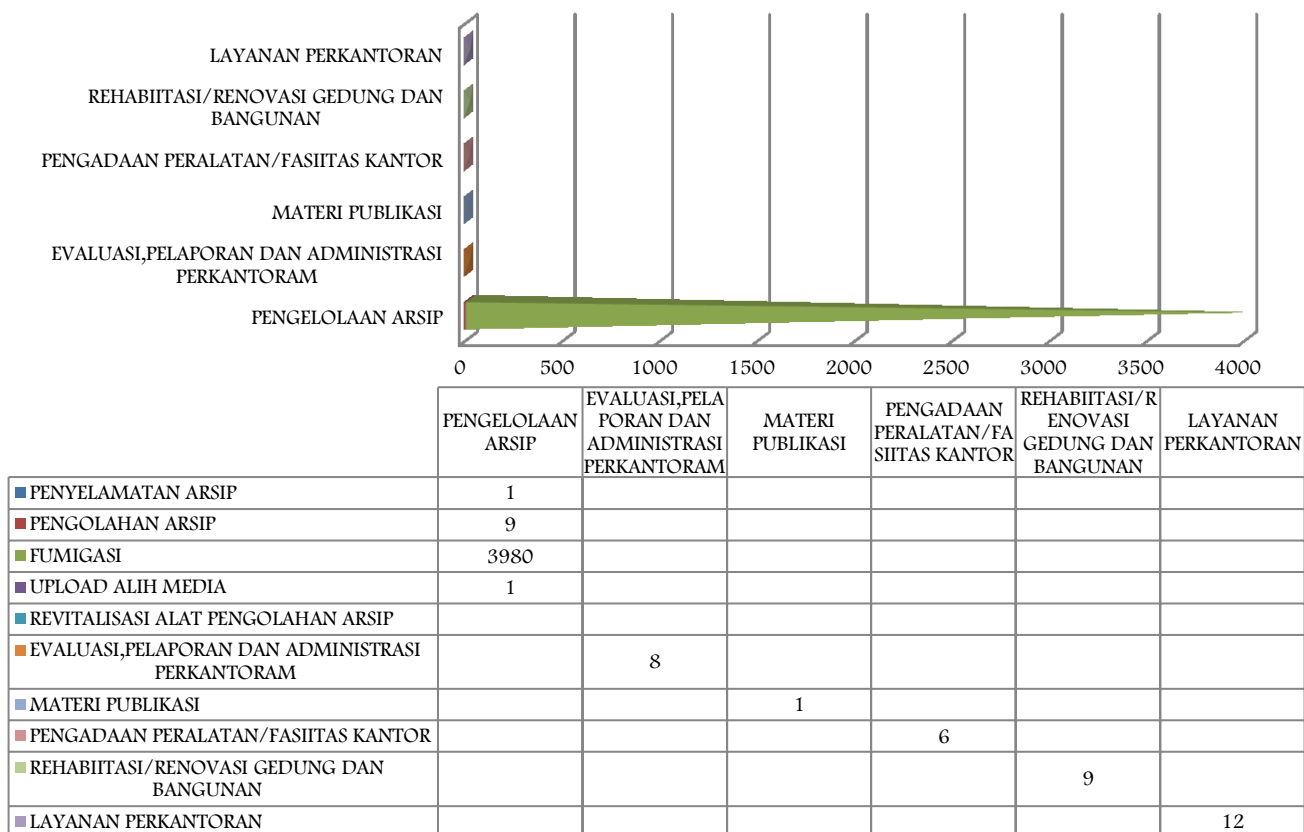


	2015	2016	2017
■ Arsip Pemilu	1337	832	166
■ Arsip Kabinet Indonesia Bersatu	654	4312	1470
■ Arsip Kepresidenan	38	20	205
■ Wawancara Lisan	67	76	95

**TABEL KHASANAH ARSIP BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI  
TAHUN 2017**



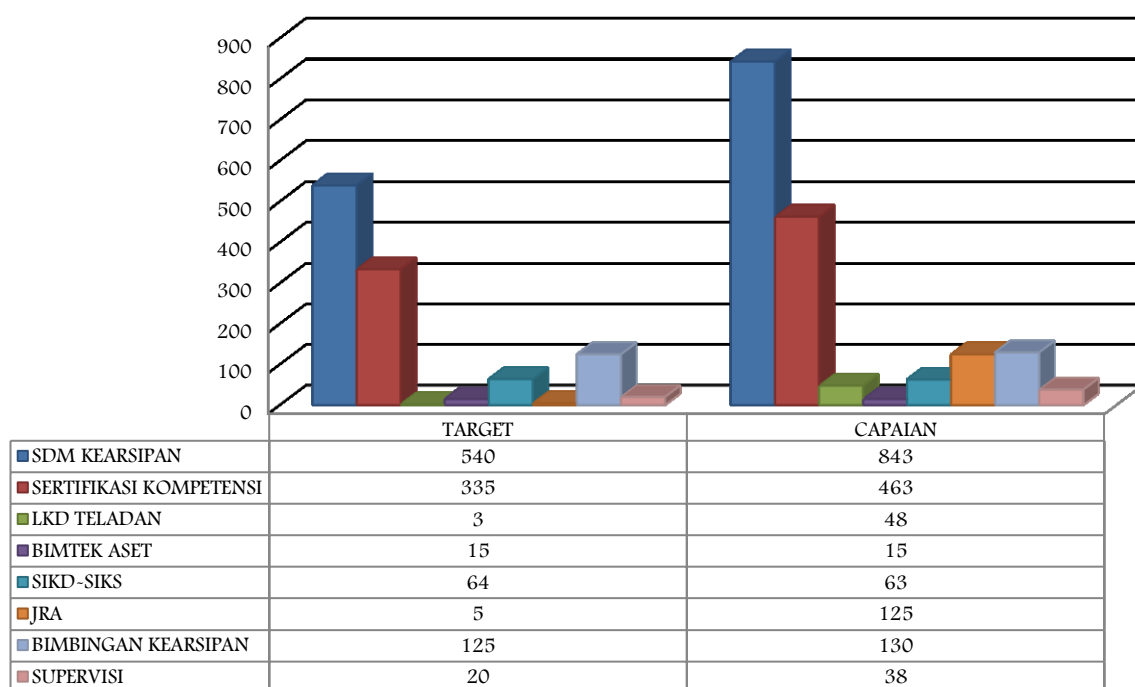
**TABEL CAPAIAN KINERJA BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI  
TAHUN 2017**



	PENGELOLAAN ARSIP	EVALUASI, PELAPORAN DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	MATERI PUBLIKASI	PENGADAAN PERALATAN/FASITAS KANTOR	REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN	LAYANAN PERKANTORAN
■ PENYELAMATAN ARSIP	1					
■ PENGOLAHAN ARSIP	9					
■ FUMIGASI	3980					
■ UPLOAD ALIH MEDIA	1					
■ REVITALISASI ALAT PENGOLAHAN ARSIP						
■ EVALUASI, PELAPORAN DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		8				
■ MATERI PUBLIKASI			1			
■ PENGADAAN PERALATAN/FASITAS KANTOR				6		
■ REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN					9	
■ LAYANAN PERKANTORAN						12

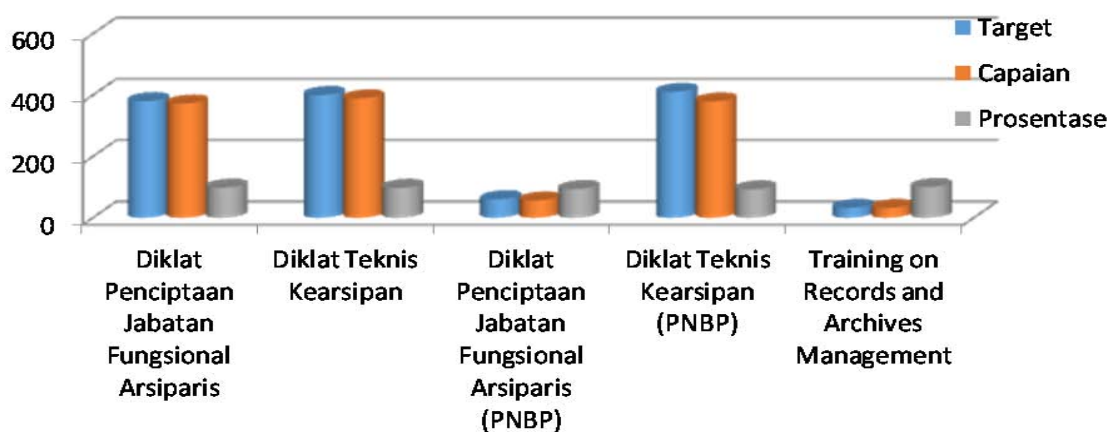


**TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI PEMBINAAN  
TAHUN 2017**

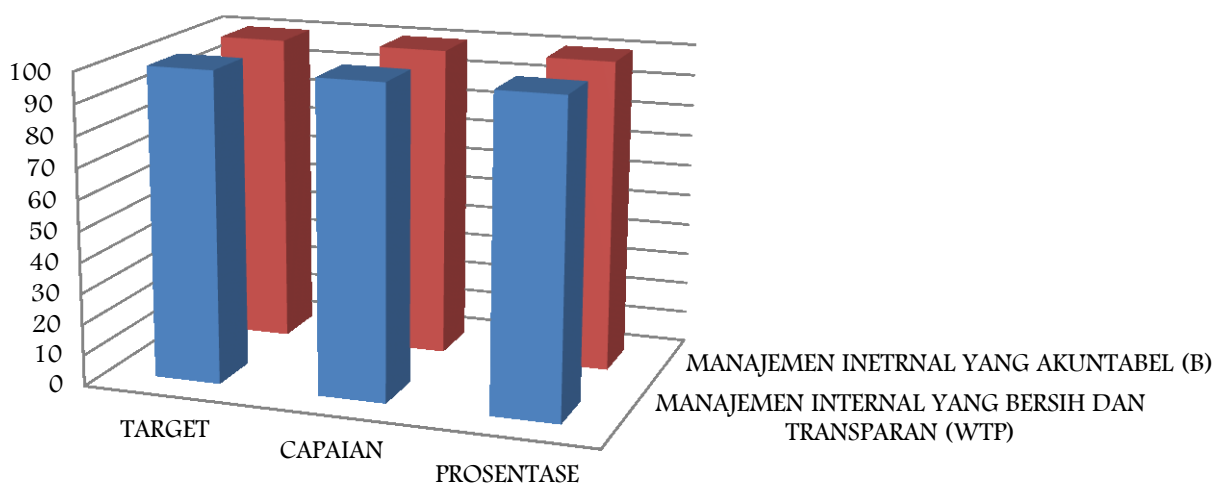


**TABEL CAPAIAN KINERJA  
PUSDIKLAT KEARSIPAN TAHUN 2017**

No.	Indikator Kerja Utama	Target	Capaian	
		(Orang)	(Orang)	%
1	Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis	380	372	97.89
2	Diklat Teknis Kearsipan	400	389	97.25
3	Diklat Penciptaan Jabatan Fungsional Arsiparis (PNBP)	60	56	93.33
4	Diklat Teknis Kearsipan (PNBP)	410	379	92.44
5	Training on Records and Archives Management	32	32	100.00
Jumlah		1282	1228	95.79

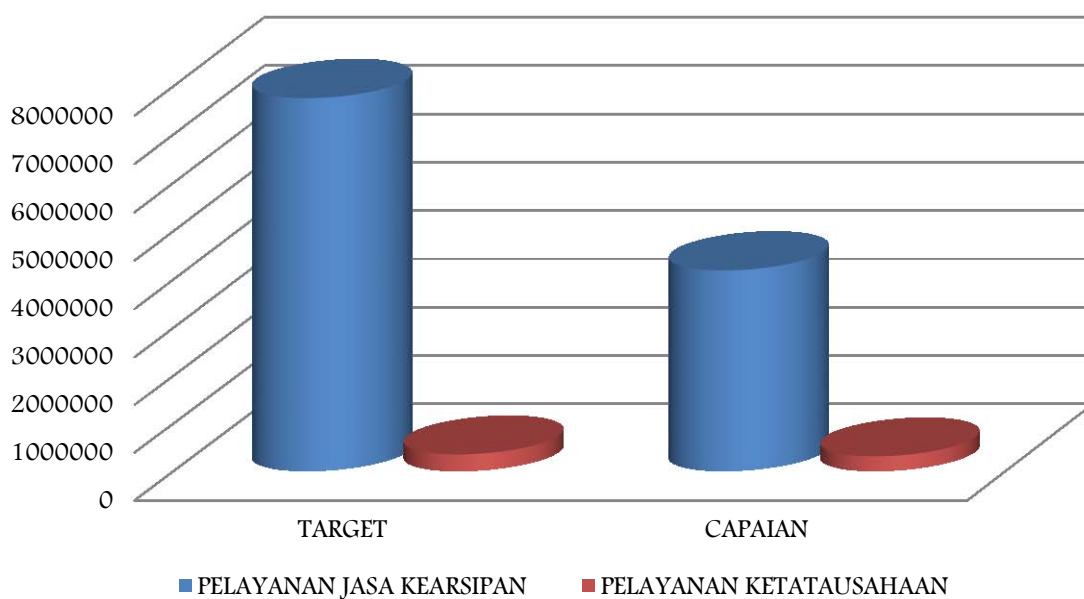


**TABEL CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN 2017**

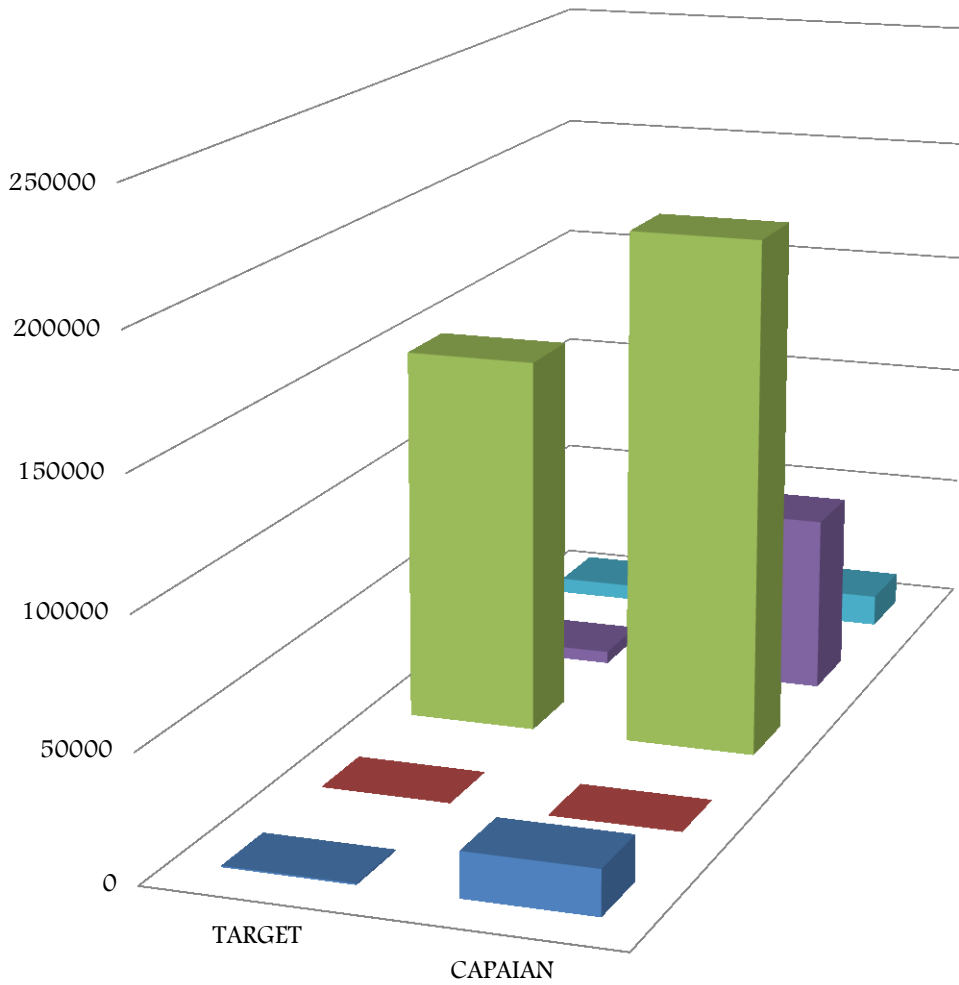


	TARGET	CAPAIAN	PROSENTASE
■ MANAJEMEN INTERNAL YANG BERSIH DAN TRANSPARAN (WTP)	100	100	100
■ MANAJEMEN INETRNL YANG AKUNTABEL (B)	100	100	100

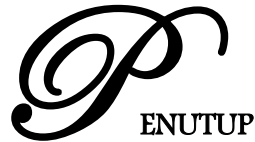
**TABEL CAPAIAN KINERJA PUSAT JASA KEARSIPAN  
TAHUN 2017**



**TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KONSERVASI  
TAHUN 2017**



- ARSIP STATIS YANG DI SELAMATKAN
- ARSIP STATIS YANG DI OLAH
- ARSIP STATIS YANG DI PRSERVASI
- ARSIP STATIS YANG DI AKSES
- ARSIP STATIS SEBAGAI INFORMASI PUBLIK



Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2017 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional. LAKIP ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja ANRI dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

LAKIP ANRI disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja (*performance results*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2017 ini menampilkan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam indikator kinerja utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Secara umum ANRI telah dapat memenuhi atau sesuai rencana dengan yang telah ditetapkan. Namun demikian, tidak seluruh target kinerja dapat direalisasikan sesuai yang direncanakan. Tidak terealisasinya target kinerja dalam rangka meningkatkan pembinaan kegiatan kearsipan secara nasional, tidak hanya disebabkan ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan, namun juga diperlukan komitmen, partisipasi dan dukungan aktif dari segenap komponen baik instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah serta pihak swasta dan perorangan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja ANRI sangat diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, sehingga pembangunan di bidang kearsipan akan lebih dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku. Dukungan dari berbagai pihak harus dapat dilaksanakan secara nyata, tidak hanya merupakan gambaran atau cita-cita semata yang hanya merupakan wacana dan pergulatan pemikiran semata, sehingga apa yang telah dilaksanakan dapat diaplikasikan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada

hasil, berbasis kinerja dan bertujuan untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan ANRI: a. Peningkatan dan pengembangan simpul JIKN dalam upaya memberikan layanan akses kepada publik. b. Peningkatan pengelolaan arsip berbasis e-arsip melalui penerapan SIKD dan SIKS pada unit kearsipan Lembaga Negara, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Pemerintah Pusat maupun Daerah. c. Peningkatan penyelamatan, perlindungan dan perawatan arsip strategis melalui sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi. d. Peningkatan kerja sama dan sinergitas berkelanjutan dengan lembaga kearsipan Internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica maupun lembaga kearsipan di K/L di pusat dan daerah.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan juga dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi ANRI, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja ini harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator indikator kinerja yang telah ada sesuai perkembangan tuntutan yang ada, sehingga ANRI dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan tetap mengedepankan pelayanan yang profesional.

Jakarta, Februari 2018

Kepala,



Dr. Mustari Irawan. MPA.

# KILASAN ARSIP 2017

JANUARI	COFFEE MORNING
FEBRUARI	RAKOR JABFUNG ARSIPARIS
MARET	KUNJUNGAN BUPATI DONGGALA
APRIL	DIKLAT KSST - TIMOR LESTE
MEI	PENCANANGAN GNSTA DI KEMENKES
JUNI	PAMERAN ARSIP PANCASILA
JULI	PELANTIKAN PEJABAT DILINGKUNGAN ANRI
AGUSTUS	PENYERAHAN ARSIP GUSDUR
SEPTEMBER	PELANTIKAN DEPUTI IPSK
OKTOBER	RAPAT UNESCO
NOVEMBER	SEMINAR AAI TENTANG PENYELAMATAN ARSIP ASET
DESEMBER	AUDIENSI DENGAN KEPALA MUSIUM BELANDA

